



Akses Program Perlindungan Sosial

Institut KAPAL Perempuan

Perempuan miskin dan marjinal belum mengakses layanan program perlindungan sosial. Hal ini disebabkan oleh masalah tata kelola pemerintahan pusat dan daerah, kebijakan publik yang belum berperspektif gender dan diskriminatif. KAPAL Perempuan berupaya meningkatkan partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam pemantauan program perlindungan sosial pemerintah.



PROGRAM

Pengembangan **Gender Watch* dalam pemantauan program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan.

SASARAN PROGRAM

Perempuan miskin dan marjinal di wilayah kerja program.

TUJUAN

Meningkatkan partisipasi perempuan miskin dalam perencanaan dan pemantauan pelaksanaan program perlindungan sosial pemerintah.

FOKUS KEBIJAKAN

1. Kebijakan terkait program perlindungan sosial pemerintah.
2. Kebijakan *pro poor* dan *pro gender*:
 - Peraturan Bupati tentang partisipasi perempuan miskin dalam pemantauan sistem perlindungan sosial.
 - MoU dengan Pemerintah Kabupaten untuk pelaksanaan pemantauan bersama.
 - SK Bupati tentang penguatan pelaksanaan pemantauan dengan mendukung Komite Pemantau yang terdiri dari tim Pemantau Komunitas dan Pemantau Kabupaten.

STRATEGI

1. Mengembangkan pengetahuan (melalui workshop dan penelitian) mengenai perlindungan sosial dan dampaknya terhadap kesejahteraan dan partisipasi perempuan.
2. Advokasi berbasis data untuk memastikan program perlindungan sosial menjangkau perempuan miskin dan marjinal.
3. Penguatan kepemimpinan dan kapasitas perempuan miskin.
4. Penguatan jaringan advokasi di tingkat lokal dan nasional.

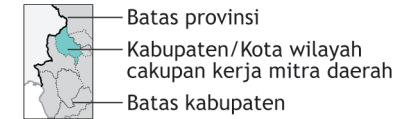
HASIL CAPAIAN (2013-2014)

- **4 Nota Kesepahaman** pelaksanaan *gender watch* ditandatangani pemerintah kabupaten di 3 provinsi.
- Dibentuknya **tim pemantau kabupaten** dan **forum multipihak** di 4 provinsi.
- **748 perempuan** terlibat di **47 sekolah perempuan**.

WILAYAH KERJA

- 6 provinsi
- 9 kabupaten/kotamadya
- 13 kecamatan
- 25 desa

LEGENDA PETA



• DATA DESEMBER 2014

